

KONSEP DASAR PELAKSANAAN BIMBINGAN KONSELING DI SEKOLAH

YENTI ARSINI

*Dosen Tetap Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sumatera Utara Medan Jl.
Williem Iskandar Pasar V Medan Estate Kec. Percut Sei Tuan – Medan
E-mail: yentiarsini@uinsu.ac.id*

Abstract:

Counseling guidance is a process of assistance given by BK teachers to students, both individually and in groups to be able to be independent and develop optimally, both in the personal, learning, social and career fields through various types of support services and activities, based on norms which applies to be able to be independent and develop optimally. In the implementation of counseling activities in schools a BK teacher must need to understand correctly and precisely about the basic concept of conducting BK in schools, so that the implementation of BK in schools is in accordance with existing scholarship. Therefore a BK teacher must continue to explore their knowledge about BK itself, so that they become a professional and experienced BK teacher.

Keywords: *Basic concepts, Implementation, Guidance and Counseling, in Schools*

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan manusia seutuhnya seperti dimaksudkan oleh Garis-garis Besar Haluan Negara, bukanlah hal yang mudah. Dalam hal ini, peranan guru BK sangat diperlukan dan secara formal telah dimulai sejak berlakunya kurikulum tahun 1975. Sampai sekarang telah lebih seperempat abad Bimbingan dan Konseling diakui sebagai salah satu bagian yang integral dari sistem penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang sederajat, baik di sekolah-sekolah negeri maupun swasta. Pelaksana Bimbingan Konseling di sekolah adalah guru pembimbing, sesuai dengan SK Mendikbud No. 25/0/1995, kegiatan tersebut adalah:

Pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang belajar dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno, 1997:11).

Dalam memberikan layanan Bimbingan dan Konseling (Bimbingan dan Konseling), guru pembimbing di sekolah melaksanakan kegiatan bimbingan kepada siswa asuhnya sesuai dengan ketentuan yang telah ada. Setiap guru pembimbing wajib menanggung jawab 150 orang siswa sebagai siswa asuhnya. Oleh karena jumlah siswa pada satu sekolah lebih dari 150 orang, maka layanan Bimbingan dan Konseling dilaksanakan oleh beberapa orang guru pembimbing. Setiap guru pembimbing memiliki tanggungjawab secara pribadi dan juga secara kelompok. Untuk mewujudkan tanggungjawab kelompok diperlukan koordinasi yang memerlukan seorang koordinator Bimbingan dan Konseling yang bertugas mengkoordinir seluruh kegiatan Bimbingan dan Konseling yang dilaksanakan di sekolah.

Dalam kegiatan manajemen pada unit Bimbingan dan Konseling di sekolah, koordinator Bimbingan dan Konseling berfungsi sebagai manajer yang harus menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Sebagaimana diungkapkan oleh T. Hani (1997) fungsi manajemen meliputi fungsi seluruh perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), personalia atau kepegawaian (staffing), kerjasama (coordinating) dan pengawasan (controlling). Sesuai dengan tuntunan organisasi dan mekanisme layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah, peranan koordinator Bimbingan dan Konseling sebagai manajer hanya terbatas pada fungsi pengkoordinasian.

Menurut Prayitno dkk (1997) tugas koordinator Bimbingan dan Konseling yang berkaitan langsung dengan pengkoordinasian guru pembimbing meliputi kegiatan pengkoordinasian penyusunan program, pelaksanaan program, penilaian/evaluasi hasil pelaksanaan program analisis hasil pelaksanaan program serta tindak lanjut pengembangan program. Tujuannya agar pelaksanaan Bimbingan dan Konseling tidak tumpang tindih, sia-sia, duplikasi, dan dapat menimbulkan kecemasan-kecemasan dalam mempertanggungjawab Bimbingan dan Konseling tugas yang akan dan telah dilaksanakan. Karena melalui pengkoordinasian dari koordinator yang mantap dikalangan guru pembimbing akan muncul perasaan saling menghormati, keakraban, komunikasi, kreativitas, saling membantu dalam melaksanakan program Bimbingan dan Konseling

Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen memegang peranan penting untuk mewujudkan efektivitas dan efisien layanan yang diberikan. Menurut Alfonso (1995), Stoner (1982) (dalam T.Hani, 1997) koordinasi adalah proses pemanduan tujuan secara efisien. Dalam konsep koordinasi terkandung suatu proses penyatu paduan sasaran dan kegiatan dari unit-unit yang terpisah.

Mencermati pernyataan para ahli di atas, kaitannya dengan pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling di sekolah mutlak memerlukan koordinasi. Dengan suasana yang penuh koordinasi kegiatan layanan yang dilaksanakan guru pembimbing menjadi lebih terarah. Melalui koordinasi, antar sesama guru pembimbing serta personil madrasah lainnya akan memiliki pandangan yang sama terhadap layanan Bimbingan dan Konseling itu sendiri.

1. Pengertian Bimbingan dan Konseling

Bimbingan dan Konseling adalah pelayanan yang dilaksanakan dari manusia, untuk manusia, dan oleh manusia. Dari manusia, artinya pelayanan itu diselenggarakan berdasarkan hakikat keberadaan manusia dengan segenap dimensi kemanusiaannya. Untuk manusia, dimaksudkan bahwa pelayanan tersebut diselenggarakan demi tujuan yang agung, mulia dan positif bagi kehidupan manusia menuju manusia seutuhnya, baik manusia sebagai individu maupun kelompok. Oleh manusia mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan kegiatan itu adalah manusia dengan segenap derajat, martabat dan keunikannya masing-masing yang terlibat didalamnya. Proses Bimbingan dan Konseling seperti itu melibatkan manusia dan kemanusiaannya sebagai totalitas yang menyangkut segenap potensi-potensi dan kecenderungan-kecenderungannya, perkembangannya dinamika kehidupannya, permasalahan-permasalahannya, dan interaksi dinamis antara berbagai unsur yang ada itu. Menurut pendapat (Smith dalam Prayitno dan Amti, 1994) mengatakan:

Bimbingan sebagai proses layanan yang diberikan kepada individu-individu guna membantu mereka memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membuat pilihan-pilihan, rencana-rencana, dan interpretasi-intrepretasi yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan baik.

Sejalan dengan pendapat di atas bahwa bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir, melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma yang berlaku.

Dari pengetahuan tersebut juga dengan peraturan Pemerintah No. 29/1990 tentang Pendidikan Menengah, pasal 27 ayat 1, dikatakan bahwa “Bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. “Bimbingan dalam rangka menemukan pribadi”, mengandung makna bahwa guru pembimbing memfasilitasi siswa agar dengan keinginan dan kemampuannya dapat mengenal kekuatan dan kelemahan dirinya sendiri serta menerimanya secara positif dan dinamis sebagai modal pengembangan diri lebih lanjut. Tumbuhnya keinginan siswa untuk mengenal kekuatan dan kelemahan diri menjadi sangat penting karena hal itu menunjukkan adanya motivasi dari dalam diri siswa dan bukan keinginan orang lain atau paksaan dari guru pembimbing. “Bimbingan dalam rangka mengenal lingkungan” mengandung makna bahwa guru pembimbing memfasilitasi siswa untuk mengenal lingkungannya dengan baik, termasuk lingkungan yang ada di luar sekolah. Kemudian yang terakhir adalah “Bimbingan agar siswa mampu merencanakan masa depannya” mengandung makna bahwa guru pembimbing berupaya memberikan masa depannya dengan pertimbangan yang matang terhadap masalah pribadi serta pengenalan yang benar tentang lingkungannya.

2. Tujuan Bimbingan Konseling

Pendidikan menengah berkenaan dengan tujuan institusional ditetapkan bahwa pendidikan menengah bertujuan meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial. Tujuan Bimbingan sekolah menengah menurut kurikulum 1975 adalah:

1. Secara umum bimbingan konseling di sekolah bertujuan agar setelah mendapat pelayanan bimbingan siswa dapat:
 - a. Mengembangkan pemahaman dan pengertian diri dalam kemajuannya di sekolah;
 - b. Mengembangkan dunia kerja, kesempatan kerja, serta rasa tanggung jawab dalam memilih kesempatan kerja tertentu yang sesuai dengan tingkat pendidikan yang disyaratkan;
 - c. Mengembangkan kemampuan untuk memilih dan mempertemukan pengetahuan tentang dirinya dengan informasi tentang kesempatan yang ada secara tepat dan bertanggungjawab;
 - d. Mewujudkan penghargaan terhadap kepentingan dan harga diri orang lain.
2. Secara khusus bimbingan konseling di sekolah menengah atas bertujuan agar setelah mendapat pelayanan bimbingan siswa sekolah menengah atas dapat mempergunakan kemampuannya untuk:
 - a. Mengatasi kesulitan dalam memahami dirinya sendiri;
 - b. Mengatasi kesulitan dalam memahami lingkungannya yang meliputi lingkungan sekolah, keluarga, dan kehidupan masyarakat yang lebih luas;
 - c. Mengatasi kesulitan dalam mengidentifikasi dan memecahkan masalah yang dihadapinya;
 - d. Mengatasi kesulitan dalam menyalurkan kemampuan, minat, dan bakatnya dalam bidang pendidikan dan kemungkinan pekerjaan yang cepat.
3. Fungsi Bimbingan dan Konseling, Pelayanan Bimbingan dan Konseling mengembangkan sejumlah fungsi yang harus dipenuhi melalui pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Konseling. Fungsi-fungsi yang dimaksud mencakup:
 - a. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan pemahaman tentang sesuatu oleh pihak-pihak tertentu sesuai dengan kepentingan pengembangan peserta didik, baik pemahaman tentang diri peserta didik, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, maupun lingkungan “yang lebih luas”.
 - b. Fungsi pencegahan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan tercegahnya atau terhindarnya peserta didik dari berbagai

-
- permasalahan yang mungkin timbul, yang akan dapat mengganggu, menghambat, ataupun menimbulkan kesulitan dan kerugian-kerugian tertentu dalam proses perkembangannya.
- c. Fungsi pengentasan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terentaskannya atau teratasinya berbagai permasalahannya yang dialami oleh peserta didik. Fungsi pengentasan dilakukan dengan memberdayakan seluruh kemampuan konseli (siswa), sehingga keputusan yang diambil merupakan keputusan siswa dan bukan keputusan guru pembimbing, terutama yang terkait dengan fungsi pengentasan, baik melalui kegiatan konseling perorangan maupun konseling kelompok.
 - d. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang akan menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam pelaksanaannya tidak akan terlepas dari fungsi pemahaman, artinya fungsi ini akan secara efektif dilaksanakan jika guru pembimbing memahami betul peserta didik yang dibimbingnya, sehingga berbagai jenis layanan yang diberikan untuk terpeliharanya dan berkembangnya potensi peserta didik sesuai dengan kebutuhan dan keadaan mereka.
4. Prinsip-prinsip Bimbingan dan Konseling, Sejumlah prinsip dan asas yang mendasari gerak dan langkah penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling. Prinsip asas-asas ini berkaitan dengan tujuan, sasaran layanan, jenis layanan dan kegiatan pendukung, serta berbagai aspek operasionalisasi pelayanan bimbingan dan konseling. Dalam pelayanan bimbingan dan konseling perlu diperhatikan sejumlah prinsip, yaitu:
- a. Prinsip-prinsip berkenaan dengan sasaran layanan: 1) Bimbingan dan Konseling melayani semua individu tanpa memandang umur, jenis kelamin, suku, agama, dan status sosial ekonomi; 2) Bimbingan dan Konseling berurusan dengan pribadi dan tingkah laku individu yang unik dan dinamis; 3) Bimbingan dan Konseling memperhatikan sepenuhnya tahap dan

berbagai aspek perkembangan individu; 4) Bimbingan dan Konseling memberikan perhatian utama kepada perbedaan individual yang akan menjadi orientasi pokok pelayanan.

- b. Prinsip-prinsip berkenaan dengan permasalahan individu: 1) Bimbingan dan Konseling berurusan dengan hal-hal yang menyangkut pengaruh kondisi mental/fisik individu terhadap penyesuaian dirinya di rumah, di sekolah, serta dalam kaitannya dengan kontak sosial dan pekerjaan, dan sebaliknya pengaruh lingkungan terhadap kondisi mental dan fisik individu; 2) Kesenjangan sosial, ekonomi, dan kebudayaan merupakan faktor timbulnya masalah pada individu yang kesemuanya menjadi perhatian utama pelayanan bimbingan dan konseling.
- c. Prinsip-prinsip Berkenaan Dengan Program Layanan: 1) Bimbingan dan Konseling merupakan bagian integral dari upaya pendidikan dan pengembangan individu, oleh karena itu program bimbingan dan konseling harus diselaraskan dan dipadukan dengan program pendidikan serta pengembangan peserta didik; 2) Program bimbingan dan konseling harus fleksibel, disesuaikan dengan kebutuhan individu, masyarakat, dan kondisi lembaga; 3) Program bimbingan dan konseling disusun secara berkelanjutan dari jenjang terendah sampai tertinggi. Terhadap isi dan pelaksanaan program bimbingan dan konseling perlu diadakan penilaian yang teratur dan terarah.
- d. Prinsip-prinsip berkenaan dengan tujuan dan pelaksanaan pelayanan: 1) Bimbingan dan Konseling harus diarahkan untuk pengembangan individu yang akhirnya mampu membimbing diri sendiri dalam menghadapi permasalahannya; 2) Dalam proses bimbingan dan konseling keputusan yang diambil dan akan dilakukan oleh individu hendaknya atas kemauan individu itu sendiri, bukan karena kemauan atau desakan dari pembimbing atau pihak lain; 3) Permasalahan individu harus ditangani oleh tenaga ahli dalam bidang yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi; 4) Kerja sama antara guru pembimbing, guru-guru lain, dan orang tua amat menentukan hasil pelayanan bimbingan; 5) Pengembangan program

pelayanan bimbingan dan konseling ditempuh melalui pemanfaatan yang maksimal dari hasil pengukuran dan penilaian terhadap individu yang terlibat dalam proses pelayanan dan program bimbingan dan konseling itu sendiri.

5. Asas-asas Bimbingan dan Konseling

Penyelenggaraan layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling selain dimuati oleh fungsi dan didasarkan pada prinsip-prinsip bimbingan juga dituntut untuk memenuhi sejumlah asas bimbingan. Pemenuhan atas asas-asas itu akan memperlancar pelaksanaan dan lebih menjamin keberhasilan layanan/kegiatan, sedangkan peningkatannya akan dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan serta mengurangi atau mengaburkan hasil layanan/kegiatan bimbingan dan konseling itu sendiri.

- a. Asas kerahasiaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik (konseli) yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui orang lain. Dalam hal ini guru pembimbing berkewajiban penuh memelihara dan menjaga semua data dan keterangan itu, sehingga kerahasiaannya benar-benar terjamin;
- b. Asas kesukarelaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki adanya kesukaan dan kerelaan peserta didik (konseli) mengikuti/menjalani layanan kegiatan yang diperuntukan baginya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban membina dan mengembangkan kesukarelaan seperti itu;
- c. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik (konseli) yang menjadi sasaran layanan/kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik di dalam memberikan keterangan dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi dirinya. Dalam hal ini, guru pembimbing berkewajiban mengembangkan keterbukaan peserta didik. Keterbukaan ini amat terkait pada diri peserta didik yang menjadi sasaran layanan/kegiatan.

Agar peserta didik dapat terbuka, guru pembimbing terlebih dahulu harus bersikap terbuka dan tidak berpura-pura;

- d. Asas kegiatan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki peserta didik yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan/kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan/kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya;
- e. Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling yaitu; peserta didik sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi individu-individu yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima dirinya sendiri dan lingkungannya mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri;
- f. Asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik dalam kondisinya sekarang. Layanan yang berkenaan dengan masa depan atau kondisi masa lampau, dilihat dampak dan atau kaitannya dengan kondisi yang ada dan apa yang dapat diperbuat sekarang;
- g. Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan yang sama hendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton, dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhannya tahap-tahap perkembangan dari waktu ke waktu;
- h. Asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan bimbingan dan konseling baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadukan untuk itu, kerja sama antara guru pembimbing dan pihak-pihak yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan;
- i. Asas kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki segenap layanan bimbingan dan konseling didasarkan pada dan tidak boleh

bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada, yaitu norma-norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku;

- j. Asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah professional;
 - k. Asas alih tangan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik (konseli) mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli;
 - l. Asas Tut Wuri Handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan dapat menciptakan suasana yang mengayomi (memberikan rasa aman), mengembangkan keteladanan, memberikan rangsangan dan dorongan, serta kesempatan yang seluas-luasnya kepadapeserta didik untuk maju.
6. Tugas Pokok Guru Pembimbing

Guru pembimbing melaksanakan tugas pokoknya di sekolah berkenaan dengan pelayanan bimbingan dan konseling, terutama untuk kepentingan siswa. Berkaitan dengan itu, Erikson (dalam Mortensen and Schmuller, 1994), kegiatan pelayann bimbingan dan konseling di sekolah meliputi : Individualinventory, the counseling, the information services, the placement service, and the follow up services. Kegiatan bimbingan dan konseling mencakup pengumpulan data individual, konseling, layanan informasi, layanan penempatan dan layanan tindak lanjut. Lebih lanjut Carmical dan Calvin (dalam Balkin, 1982: 192) mengemukakan bahwa tugas konselor sekolah, yaitu:

- a. *Providing the students an opportunity to “talk trough is problems”;*
- b. *Counseling with potential drop outs;*
- c. *Counseling with students counseling academic failure;*
- d. *Counseling with student in evaluating personal assets and limitations and;*

e. *Counseling with students counseling learning difficulties.*

Pendapat di atas menjelaskan bahwa tugas pokok konselor sekolah adalah memberi kesempatan kepada siswa membicarakan masalah yang dihadapinya, menyelenggarakan konseling terhadap siswa berpotensi putus sekolah, terhadap siswa yang gagal secara akademik, terhadap siswa untuk membahas kekuatan dan keterbatasannya serta terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar. Pandangan lain dikemukakan oleh Gibson dan Mitchell, (1987:67) tugas guru pembimbing adalah:

- a. *Assesment of the individual's and other characteristics;*
- b. *Counseling the individual;*
- c. *Group counseling and guidance activities;*
- d. *Career guidance including the providing of occupational information;*
- e. *Placement, follow up and accountability evaluation and;*
- f. *Consultation with teacher and other school personils, parents, pupils in group and appropriate community agencies*

Pendapat di atas menyebutkan bahwa tugas guru pembimbing adalah mengenali siswa secara individu dengan berbagai karakteristiknya, melaksanakan konseling perorangan, bimbingan dan konseling kelompok, bimbingan karier, termasuk informasi pendidikan dan pekerjaan, penempatan, tindak lanjut dan melakukan penilaian, serta konsultasi dengan guru dan personil sekolah lainnya, orang tua, siswa, kelompok dan organisasi masyarakat.

Tugas guru pembimbing yang dikemukakan para ahli di atas mengarah pada penekanan yang berbeda. Carmical dan Calvin (1982) melihat tugas guru pembimbing dari aspek konseling dengan memfokuskan pada siswa yang berpotensi putus sekolah, gagal secara akademik karena mengalami kesulitan dalam belajar. Erickson (dalam Mortensen and Schmuller, 1994) dan Gibson and Mithcell, (1987) melihat tugas guru pembimbing lebih luas, tidak hanya terbatas pada konseling, tetapi juga memberikan layanan lain di sekolah, seperti karier atau pekerjaan.

Dengan pengertian itu semua tugas guru pembimbing mencakup mengumpulkan data siswa, memberikan layanan informasi, konseling perorangan dan kelompok, bimbingan karier, layanan penempatan, konsultasi dengan personil sekolah lainnya dan tindak lanjut.

Sebelum diterbitkannya SK Menpan No. 84 tahun 1993, kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah-sekolah belum terpolakan dengan jelas. Kondisi seperti ini telah menyebabkan timbulnya berbagai kesalahan pemahaman dan perbedaan persepsi mengenai BK di sekolah. Berkaitan dengan itu, Prayitno dkk (1997) mengusulkan agar pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dikemas sebagai satu kesatuan dalam satu pola yang dinamakannya BK Pola Tujuh Belas, yang terdiri atas empat bidang bimbingan yaitu (a) bidang sosial, (b) pribadi, (c) belajar, (d) karier. Tujuh belas layanan yaitu: (a) orientasi, (b) informasi, (c) penempatan/penyaluran, (d) pembelajaran, (e)

konseling perorangan, (f) bimbingan kelompok, serta (g) konseling kelompok, lima kegiatan pendukung yaitu : (a) aplikasi instrumentasi, (b) himpunan data, (c) konferensi kasus, (d) kunjungan rumah, serta (e) alih tangan kasus, yang semuanya didasarkan pada suatu wawasan dan pengetahuan yang mantap tentang BK mencakup pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, landasan serta asas BK.

Dalam perkembangan berikutnya BK Pola Tujuh Belas tersebut digunakan secara nasional sebagai acuan dalam penyelenggaraan BK di sekolah-sekolah di seluruh tanah air. Dalam rangka BK Pola Tujuh Belas itu lebih lanjut Prayitno dkk (1987:189- 190) menjabarkan secara rinci tugas guru pembimbing yaitu:

- a. Memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling;
- b. Merencanakan program bimbingan dan konseling (termasuk program satuan layanan dan satuan pendukung);
- c. Melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling;
- d. Melaksanakan segenap program layanan pendukung;
- e. Menilai proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan satuan pendukung bimbingan dan konseling;

- f. Menganalisis hasil penelitian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling;
- g. Melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling;
- h. Mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan pendukung bimbingan dan konseling yang dilaksanakan;
- i. Mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada guru pembimbing bimbingan dan konseling dan kepala sekolah.

Evaluasi terhadap hasil berhasil atau tidaknya guru pembimbing tergantung pada seberapa jauh program atau kegiatan yang dilaksanakan guru pembimbing itu direalisasikan. Artinya agar kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara baik, guru pembimbing perlu terlebih dahulu menyusun dan merumuskan program layanan itu dalam bentuk perencanaan yang matang sesuai dengan kebutuhan dan dirasakan manfaatnya oleh siswa. Untuk itu sebelum menyusun program layanan dan pendukung terhadap siswa, Prayitno dkk (1997: 171-172) menekankan bahwa ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan yaitu:

- a. Menetapkan materi layanan/pendukung yang sesuai dengan kebutuhan dan masalah siswa;
- b. Menetapkan tujuan atau hasil yang akan dicapai;
- c. Menetapkan sasaran kegiatan, yaitu siswa asuh yang akan dikenai kegiatan layanan/pendukung;
- d. Menetapkan bahan, sumber bahan, dan/atau nara sumber serta personil yang terkait dan peranannya masing-masing;
- e. Menetapkan metode, teknik khusus, media dan alat tulis yang digunakan sesuai dengan ciri khusus jenis layanan/pendukung yang direncanakan itu;
- f. Menetapkan rencana penilaian;
- g. Mempertimbangkan keterkaitan antara layanan/pendukung yang direncanakan itu dengan kegiatan lainnya;
- h. Menetapkan waktu dan tempat.

7. Satlan, Satkung dan Lapelprog

Konsep dalam pelaksanaan program bimbingan dan konseling berdasarkan pada rencana yang telah dibuat oleh guru pembimbing dari program tahunan, semesteran, bulanan, mingguan dan selanjutnya dijabarkan ke dalam program-program harian yang diwujudkan dalam berbagai Satuan Layanan jenis layanan yang dilaksanakan secara tatap muka dengan siswa yang bersangkutan.

Pelaksanaan isi program itu selalu dikaitkan dengan lima tahapan kegiatan layanan bimbingan dan konseling yaitu: 1) penyusunan program, 2) pelaksanaan program, 3) penilaian hasil layanan, 4) analisis hasil layanan, 5) tindak lanjut. Penilaian hasil layanan dilakukan bimbingan dan konseling, baik bersifat penilaian segera (Laiseg), penilaian jangka pendek (Laijapen), dan penilaian jangka panjang (Laijapang). Untuk setiap jenis layanan, guru pembimbing dituntut untuk melaksanakan kelima tahap tersebut, dan pada setiap akhir semester guru pembimbing melakukan penilaian menyeluruh terhadap hasil-hasil kegiatan bimbingan dan konseling yang ia laksanakan selama satu semester. Program bimbingan dan konseling secara menyeluruh secara ideal disusun berturut-turut mulai dari semester pertama kelas satu samapai dengan semester enam kelas tiga. Program-program tersebut merupakan kesinambungan dinamis dari yang pertama sampai dengan keenam. Sementara kondisi yang demikian itu belum tercapai, para guru pembimbing masing-masing menyusun program bimbingan dan konseling mulai dari semester pertama untuk kelas-kelas yang menjadi tanggung jawabnya.

Dalam praktik lebih lanjut, penyusunan program semester (dimulai dari semester pertama) disusun berdasarkan pengalaman guru pembimbing dalam melaksanakan program-program harian, mingguan dan bulanan. Satu hal yang perlu selalu dipedomani ialah bahwa program-program disusun harus memuat semua unsur yang dimaksudkan akan membuat kegiatan bimbingan dan konseling di sekolah merupakan kegiatan yang dapat diandalkan untuk perkembangan optimal siswa.

Program layanan bimbingan dan konseling disusun secara bertahap, sehingga dapat dilaksanakan secara baik. Tahap dan langkah yang telah dirumuskan pakar menjadi acuan untuk diikuti dan dikembangkan secara baik. Tahap-tahap kegiatan bimbingan dan konseling disekolah ada lima, sebagaimana dikemukakan Prayitno dkk (1997) yaitu perencanaan program, pelaksanaan program, evaluasi program, analisis hasil program, serta tindak lanjut pelaksanaan program. Hal ini ditegaskan pula pada SK MENDIKBUD Nomor 25 Tahun 1995 (Depdikbud, 1995) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya, disebutkan bahwa tugas pokok guru pembimbing di sekolah, (1) menyusun program bimbingan, yaitu bidang bimbingan pribadi, belajar, sosial, dan karier, (2) melaksanakan program bimbingan, yaitu melaksanakan fungsi pemahaman, pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan dalam setiap bidang layanan, (3) evaluasi pelaksanaan bimbingan, (4) analisis hasil evaluasi, serta (5) hasil tindak lanjut.

Program itu dijabarkan sedemikian rupa dalam bentuk kegiatan harian yang secara langsung dapat dilaksanakan terhadap sasaran layanan. Kegiatan harian ini direncanakan dalam bentuk satuan kegiatan yang disebut Satuan Layanan (SATLAN) dan Satuan Pendukung (SATKUNG). Satuan layanan adalah satu unit pedoman untuk memberikan layanan, di dalamnya dicantumkan topik pembahasan, bidang, jenis, fungsi hasil yang dicapai dan lain-lain. Sedangkan satuan pendukung adalah satu unit kegiatan pendukung aplikasi instrumentasi dalam bimbingan dan konseling, didalamnya dikemukakan mengenai topik pembahasan, jenis fungsi dan uraian mengenai instrumen yang digunakan.

Satuan kegiatan tersebut dilaksanakan dan hasil-hasilnya dinilai. Pelaksanaan kegiatan dan penilaian hasil-hasilnya dilaporkan melalui laporan pelaksanaan program (LAPELPROG). Selanjutnya diadakan evaluasi terhadap hasil penilaian dan dilakukan upaya tindak lanjut dalam rangka pengembangan.

Berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ayat 1 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau

latihan bagi peranannya dimasa akan datang. Ayat 8 menyebutkan tenaga pendidik adalah anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar dan/atau melatih peserta didik, dapat dipahami bahwa pembinaan atau proses pendidikan yang diberikan kepada siswadisekolah dapat berbentuk bimbingan, pengajaran dan latihan. Ketiganya menghendaki pendekatan, strategi dan teknik yang mungkin berbeda dan harus dilaksanakan oleh orang yang memiliki kualifikasi khusus. Inilah yang selanjutnya melahirkan pembagian tugas. Guru pembimbing bertugas untuk memberika layanan, guru mata pelajaran untuk melaksanakan pengajaran dan guru praktik untuk memberikan praktik kepada siswa.

Guru pembimbing diberi tugas untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa. Isi undang-undang diatas dipertega dalam PP. No. 29/90 tentang Pendidikan Mengeah pasal 27 ayat 1, dinyatakan bahwa bimbingan merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa dalam rangka upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan dan merencanakan masa depan. Oleh karena itu, bimbingan perlu diberikan orang yang memiliki keahlian khusus untuk itu, karena bimbingan tidak dapat dilaksanakan guru mata pelajaran atau guru praktik.

Lebih tegas lagi dinyatakan pada ayat 2, bahwa bimbingan diberikan oleh guru pembimbing yaiyu guru yang bertugas untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling terhadap pribadi siswa. Tujuannya adalah agar dapat membantu mengembangkan potensinya secara optimal untuk kepentingan dirinya sendiri maupun kaitannya dengan berinteraksi secara sosial dengan lingkungan.

Khusus untuk siswa Madrasah, Kurikulum tahun 1975 menggariskan bahwa (dalam Thantawy, 1995), Bimbingan di Madrasah denganmemperhatikan kemungkinan khusus yang diberikan kepada siswa-siswa Madrasah dengan kesulitan yang mereka dapati dalam memahami diri, mengarahkan diri dan bertindak serta berisikan dengan bantuan dan keadaan lingkungan sekolah, keluarga dan masyarakat.

Lebih lanjut dalam PP No. 38/1992 tentang tenaga kependidikan, pasal 1 ayat 3 menyebutkan bahwa tenaga pembimbing adalah tenaga yang bertugas membimbing peserta didik. Sejalan dengan itu dalam SKB Mendikbud dan kepala BAKN No. 0433/P/1993 dan No. 25 tahun 1993 mengenai pelaksanaan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya pada pasal 1 ayat 4 dijelaskan pula bahwa guru pembimbing adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah peserta didik.

Namun demikian, tidak berarti bahwa tugas guru pembimbing terpisah atau tidak berkaitan dengan tugas-tugas lainnya di sekolah. Secara bersama-sama dengan petugas lainnya secara simultan mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan itu antara lain ditandai dengan tercapainya tri sukses di sekolah sebagai hasil penyelenggaraan pendidikan, yang meliputi (1) sukses akademis, (2) sukses perencanaan karir, serta (3) sukses sosial kemasyarakatan.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa salah satu komponen penyelenggaraan pendidikan disekolah adalah guru pembimbing. Guru pembimbing adalah orang atau individu yang diberi tugas khusus sebagai pembimbing yang tugasnya berbeda dengan guru mata pelajaran maupun guru praktik, baik secara konseptual maupun operasional. Menurut Prayitno dkk (1997), tugas guru pembimbing adalah (1) memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling, (2) merencanakan program bimbingan dan konseling terutama program satuan layanan dan satuan pendukung, (3) melaksanakan segenap program satuan layanan bimbingan dan konseling, (4) melaksanakan segenap program layanan pendukung, (5) menilai proses dan hasil pelaksanaan satuan layanan dan satuan pendukung bimbingan dan konseling, (6) menganalisis hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung BK, (7) melaksanakan tindak lanjut berdasarkan hasil penilaian layanan dan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling, (8) mengadministrasikan kegiatan satuan layanan dan satuan pendukung bimbingan dan konseling yang dilaksanakan, serta (9) mempertanggung jawabkan tugas dan kegiatannya dalam pelayanan

bimbingan dan konseling secara menyeluruh kepada guru pembimbing dan kepala sekolah.

Tugas diatas akan dinilai berhasil atau sebaliknya melalui realisasi program yang dilaksanakan atau kegiatan yang dilaksanakan guru pembing. Agar kegiatan yang telah disusun dapat dilaksanakan secara baik. Guru pembimbing perlu terlebih dahulu menyusun dan merumuskannya dalam bentuk perencanaan yang benar-benar dibutuhkan, dirasakan manfaatnya serta dapat meningkatkan kualitas siswa yang menerima bantuan tersebut.

Untuk itu sebelum menyusun program layanan dan pendukung terhadap siswa, maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Antara lain sebagaimana dikemukakan Prayitnodkk (1997), yaitu (1) menetapkan materi layanan/pendukng yang sesuai dengan kebutuhan dan/atau masalah siswa, (2) menteapkan tujuan atau hasil yang akan dicapai, (3) menetapkan sasaran kegiatan, yaitu siswa asuh yang akan dikenai kegiatan layanan/pendukung, (4) menetapkan bahan, sumber bahanm dan nara sumber serta personil yang terkait dan peranannya masing-masing, (5) menetapkan metode, teknik khusus, media dan alat yang digunakan sesuai dengan ciri khusus jenis layanan/pendukung yang direncanakan itu, (6) menetapkan rencana penilaian, (7) mempertimbangkan keterkaitan antara layanan/pendukung yang direncanakan itu dengan kegiatan lainnya, serta (8) menetapkan waktu dan tempat.

Tugas utama guru pembimbing adalah melaksanakan bimbingan dan konseling. Seberapa besar keberhasilan yang dicapai guru pembimbing dalam melaksanakan kegiatan di sekolah sekaligus pula dijadikan sebagai tolak ukur akan kemampuannya dalam melaksanakan peran di sekolah. Untuk itu, seluruh perencanaan, program, kegiatan, evaluasi dan tindak lanjut yang dirumuskannya haruslah secara baik dan melibatkan seluruh personel sekolah sehingga kegiatan bimbingan dan konseling bukan merupakan tugas guru pembimbing saja, melainakn telah menjadi suatu gerakan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program pendidikan dalam pembinaan siswa di sekolah.

PENUTUP

Penyelenggaraan Bimbingan konseling di sekolah haruslah diberikan kepada seorang guru BK yang memang betul-betul tamatan dari jurusan Bimbingan konseling sehingga realisasi pelaksanaan Bimbingan konseling di sekolah-sekolah sesuai dengan SK Mendikbud No. 25/0/1995, kegiatan tersebut adalah : Pelayanan bantuan untuk peserta didik, baik secara perorangan maupun kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal, dalam bidang belajar dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung, berdasarkan norma-norma yang berlaku.

Konsep dasar pelaksanaan Bimbingan konseling yang terdiri dari pengertian, tujuan , prinsip, fungsi dan asas, haruslah sesuai dengan kaidah kaidah yang berlaku dan seorang guru Bk juga harus perlu memahami tugas dan peranannya dalam penyelenggaraan bimbingan konseling di sekolah. Adapun tugas pokok guru BK disekolah adalah memberi kesempatan kepada siswa membicarakan masalah yang dihadapinya, menyelenggarakan konseling terhadap siswa berpotensi putus sekolah, terhadap siswa yang gagal secara akademik, terhadap siswa untuk membahas kekuatan dan keterbatasannya serta terhadap siswa yang mengalami kesulitan belajar.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnibar. *Kinerja Guru Pembimbing dan Faktor yang Mempengaruhinya di Sekolah Menengah Umum Negeri 5 Kotamadya Padang*. (Tesis S2). Padang. PPS IKIP Padang, 2000.
- Belkin, G.S. *Practical Counseling in the School*. Iowa: William C.Brown Company Publishers, 1975.
- Depdikbud. *Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, no.5/0/1995: Tentang petunjuk Teknis Ketentuan Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya*. Jakarta, 1995.
- Djumur, I. dan Moh. Surya. *Bimbingan dan Pentuluhan di Sekolah*. Bandung: Ilmu, 1975.
- Faisal, Sanafiah. *Pengantar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Gramedia: 1992.

- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 1989.
- Munandir. *Bimbingan Karir di Sekolah*. Jakarta: Dirjen DIKTI Depdikbud, 1989.
- Prayitno. *Pengelolaan Bimbingan dan Konseling*. Buku materi calon instruktur bimbingan dan Konseling Menengah Umum. Jakarta: 1996.
- _____. *Seri Pemandu Pelaksanaan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Buku III. Jakarta: Penebar Aksara, 1997.
- _____. *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta: 1999.
- _____. *Bagaimana Mutu BK di Sekolah Kita? Suara Pembimbing No.6 Tahun III Juli – Desember*. ISSN 1411 – 5026. IPBI: Padang, 2000.
- _____. *Panduan Kegiatan Pengawasan Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sardiman, Masri dan Sofyan Efendi. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Sirait, Alfonso. *Manajemen Edisi Mahasiswa*. Jakarta: Erlangga, 1995.
- Thantawy, R. *Manajemen Bimbingan dan Konseling*, Jakarta: Pamato: 1995.
- Walgito, Bimo. *Bimbingan dan Penyuluhan di sekolah*. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Winkel, W.S. *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*. Jakarta: Grasindo, 1997.
- Yalinus. *Pengembangan dan Pemanfaatan Himpunan Data dalam Kegiatan Bimbingan dan Koseling*. Fakultas Pascasarjana UNP: Tesis. 2002.
- Yusuf A. Muri. *Dasar-dasar Metode Penelitian*. Padang: FIP IKIP, 1997.